

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP), PEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI
DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) DI KABUPATEN BADUNG**

**Anak Agung Istri Diah Endiyani¹
Anak Agung Ketut Agus Suardika²
Putu Nuniek Hutnaleontina³**

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of implementing Government Accounting Standards (SAP), Utilization of Information Technology and Organizational Commitment on the Value of Information on Regional Apparatus Organization Financial Reporting (OPD) in Badung Regency. This research was conducted at 38 Regional Apparatus Organizations in Badung Regency. Data collection methods in this study used a survey method with a questionnaire. The sample used in this research is the Head of Sub Division of Finance, Bookkeeping and Treasurer in each Regional Apparatus Organization, who have a tenure of more than one year, totaling 114 people. The sampling method used was purposive sampling method. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, this study shows that the application of Government Accounting Standards (SAP), Utilization of Information Technology and Organizational Commitment has a positive effect on the Value of Information on Financial Reporting of Regional Apparatus Organizations (OPD) in Badung Regency.

Keywords: *Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Organizational Commitment, Value of Financial Reporting Information*

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Berdasarkan tugasnya dalam menjaga akuntabilitas finansial terutama di daerah seperti pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menerbitkan laporan keuangan kepada pimpinan lembaga. Informasi yang termuat di dalam laporan wajib memiliki kegunaan bagi pembaca, atau dengan kata lain laporan harus memuat informasi yang memiliki nilai (Suwardjono, 2005: 169). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) wajib memenuhi syarat-syarat secara kualitatif laporan keuangan pemerintah sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 meliputi: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, yang artinya pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerah secara transparan dan terpercaya, dimana tiap-tiap tahun LKPD akan memperoleh penilaian dalam bentuk opini yang berasal dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Apabila BPK memberi penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPD, yang mengindikasikan bahwa pelaporan keuangan yang dilaporkan dan disusun oleh Pemerintah Daerah tersebut termasuk wajar dan berkualitas. Bentuk penilaian opini yang diberikan oleh BPK ada empat jenis opini, meliputi: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP)

Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola finansial adalah dengan menyusun laporan keuangan secara baik dan bernilai. Pada saat menyusun laporan keuangan seharusnya dilaksanakan secara tepat waktu dan mengikuti ketentuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. SAP ialah kaidah-kaidah akuntansi yang telah disepakati untuk digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Apabila badan pemerintah mampu menerapkan SAP dengan baik, maka pemerintah daerah akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan memuat informasi yang dapat dipahami oleh publik.

Suatu nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah dapat juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pada laporan keuangan yang memiliki jumlah transaksi data yang besar dan kompleks maka diperlukan kecakapan yang tinggi dalam mengelola keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Adapun teknologi informasi dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam mengendalikan organisasi internalnya yaitu melalui konsistensi dalam memproses sejumlah besar volume transaksi data. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi data pada informasi yang disajikan. Integrasi teknologi informasi di internal organisasi pemerintah yaitu pada sistem akuntansi dari kendali manual menjadi kendali komputer.

Komitmen organisai merupakan unsur yang dapat berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Ramadan (2015) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan kepatuhan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah yang layak berdasarkan SAP. Komitmen organisasi dapat diartikan

sebagai suatu unsur kepatuhan terhadap organisasi. Komitmen organisasi merupakan keterkaitan antara karyawan dengan organisasinya. Pada suatu perusahaan, karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan akan melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik serta mengupayakan segala hal demi perusahaan tempat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Tingginya komitmen yang dimiliki oleh karyawan akan meningkatkan rasa memiliki pada perusahaan, hal tersebut akan menumbuhkan keterikatan yang kuat antara karyawan dengan perusahaan (Widari dan Sutrisno, 2017)

Kabupaten Badung sejak LKPD tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 secara beruntun 5 kali memperoleh predikat WTP dari BPK (Nusabali, 25 Mei 2019), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, dimana Laporan Keuangan Perangkat Daerah ini disusun sesuai dengan faktor-faktor penting yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan.

Berlandaskan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian kembali tentang faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan seperti “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah penelitian ini seperti berikut: (1) apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Badung?, (2) apakah pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Badung?, dan (3) apakah komitmen organisasi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Badung?.

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, untuk itu penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung , 2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung, 3. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Mahasiswa jurusan akuntansi dapat menggunakan output penelitian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai pembanding untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan dari tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi di Kabupaten Badung, sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan berkualitas

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi, dan sebagai salah satu bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan terkait hal tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan secara berkala.

KAJIAN PUSTAKA

Pelaporan laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memberikan informasi kepada public dan pihak yang berkaitan. Apabila berbagai pihak yang membaca pelaporan keuangan tersebut paham dan mendapatkan manfaat dari pelaporan tersebut maka laporan tersebut telah mencapai tujuan dan manfaatnya yaitu memberikan informasi. Berdasarkan Suwardjono (2005: 169-178) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat memiliki nilai dan

memberikan manfaat bagi pembacanya. Informasi yang terkandung dalam laporan dikatakan bernilai dan berkualitas apabila di dalamnya memuat unsur-unsur, antara lain: keterpahaman, keberpautan, nilai prediktif, nilai balikan, ketepatan waktu, dan keterandalan.

SAP (2008) menyatakan bahwa pada pelaporan laporan keuangan pada umumnya memuat hal-hal yang informatif dan relevan terkait penerimaan dan penggunaan dana yang dilakukan pada satu periode pembukuan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan pada organisasi masyarakat adalah sumber informasi keuangan yang ditujukan untuk memberikan informasi dalam mengambil keputusan (Mardiasmo, 2002: 159). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 penyusunan laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk akuntabilitas, pengelolaan, keselaran antar keturunan, keterbukaan, dan penilaian kinerja.

SAP ialah kaidah-kaidah akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik daerah maupun pusat. Penyusunan laporan keuangan bertujuan agar dalam menyelenggarakan akuntansi pemerintahan terciptanya transparansi dan akuntabilitas, dan upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (<http://www.wikiapbn.org/>).

Berdasarkan Bastian (2010:137), SAP ialah suatu kaidah akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan suatu indikator dalam menilai kualitas pelaporan laporan keuangan pemerintah. Dalam penilaian SAP dinyatakan berupa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pemberlakuan PSAP dimulai dari tahun 2010, dalam penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran lembaga pemerintah. Bagi lembaga pemerintah yang belum mengaplikasikan PSAP tersebut, maka lembaga tersebut dapat membuat laporan dengan mengaplikasikan PSAP berbasis kas menuju akrual dengan batas waktu maksimal yaitu 4 tahun setelah tahun anggaran 2010.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer

dengan telekomunikasi (Jurnali dan Supomo, 2002). Teknologi informasi dapat digunakan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam mengambil keputusan pada sebuah instansi, khususnya untuk penyusunan laporan, sehingga berkontribusi dalam mengambil keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi tersusun atas instrumen keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto 2001:89). Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah menyatakan bahwa pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Sistem akuntansi di instansi pemerintah dipastikan mempunyai jumlah transaksi yang besar dan kompleks. Dengan kondisi tersebut maka penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh instansi agar seluruh proses pengerjaan data dapat berjalan dengan cepat dan efektif khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, dengan demikian pelaporan keuangan dapat terlaksana secara tepat waktu, bernilai dan berkualitas. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Komitmen organisasi ialah kondisi yang mana seorang anggota yang memihak organisasinya dengan tujuan dan keinginannya untuk melindungi keanggotaannya pada sebuah organisasi tersebut. Komitmen organisasi adalah keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan hal yang berguna yang ditujukan untuk mengupayakan pencapaian yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, dan seseorang tersebut akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi adalah hal yang diutamakan baginya. Berdasarkan teori kepatuhan mengungkapkan bahwa pengaruh perilaku ketaatan selama proses berinteraksi dengan orang lain, individu tersebut akan lebih mentaati peraturan yang dianggapnya sesuai dan konsisten terhadap prinsip internalnya. Komitmen-komitmen tersebut dilakukan berdasarkan komitmen normatif, meliputi: 1) moralitas personal,

artinya mentaati hukum dikarenakan hukum tersebut merupakan keharusan, 2) legitimasi, artinya mentaati peraturan dikarenakan pihak yang menyusun hukum tersebut mempunyai hak dalam mengatur perilaku (Septiani, 2005). Oleh karena itu, maka komitmen organisasi dapat mempertahankan kepatuhan pada saat menyajikan laporan keuangan pemerintah yang handal berdasarkan SAP. Di lembaga pemerintahan, individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, akan mengolah seluruh informasi yang diperolehnya untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih baik dan berkualitas. Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi pada diri individu tersebut maka individu tersebut akan lebih mengutamakan organisasinya daripada kepentingan dirinya sendiri, dan akan selalu mengupayakan berbagai hal agar organisasinya menjadi lebih baik.

Berdasarkan Luthans (2006), komitmen organisasi adalah: (1) dorongan yang besar untuk konsisten diakui menjadi bagian dari organisasinya, (2) dorongan melakukan usaha untuk mencapai tujuan organisasi, (3) keinginan tertentu dalam menerima visi dan misi organisasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa komitmen organisasi mencerminkan kesetiaan individu pada organisasi dan reaksi yang secara terus menerus dilakukan oleh anggota organisasi yaitu menuangkan seluruh tenaganya untuk organisasinya dan mencapai tujuan organisasinya. Berdasarkan Meyer dan Allen dalam Luthans (2006) mengungkapkan bahwa terdapat tiga unsur dalam komitmen organisasi, yakni: komitmen afektif, komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif. Dari ketiganya tersebut, komitmen afektif merupakan jenis komitmen yang paling diharapkan oleh perusahaan. Individu dengan loyalitas tinggi pada umumnya memiliki komitmen afektif, individu tersebut lebih cenderung akan tetap bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Komitmen kepada organisasi sangat dibutuhkan oleh seorang pimpinan organisasi tersebut, hal tersebut ditujukan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten di dalam organisasi (Indriasari, 2008).

Penerapan SAP menentukan pelaporan laporan keuangan disajikan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. SAP ialah pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yang disesuaikan pada kualifikasi informasi keuangan yang dapat

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu oleh Kusumah (2012); Nugraheni dan Subaweh (2008). Penelitian tersebut melaporkan bahwa penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya tergolong kriteria yang baik dan penerapan SAP memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun penelitian yang dilakukan Nugraheni dan Subaweh (2008) mengungkapkan bahwa penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan. Berlandaskan pada penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempengaruhi secara positif pada Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung”

Hamzah (2009) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memuat terkait pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, serta pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara efisien dan murah oleh publik. Berdasarkan hasil penelitian Indriasari dkk (2008), Winidyaningrum dkk (2011), Mustafa dkk (2010), Rosalin dkk (2011) dan Hullah dkk (2012) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi secara positif pada keterandalan pelaporan keuangan daerah. Berlandaskan hasil penelitian-penelitian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung

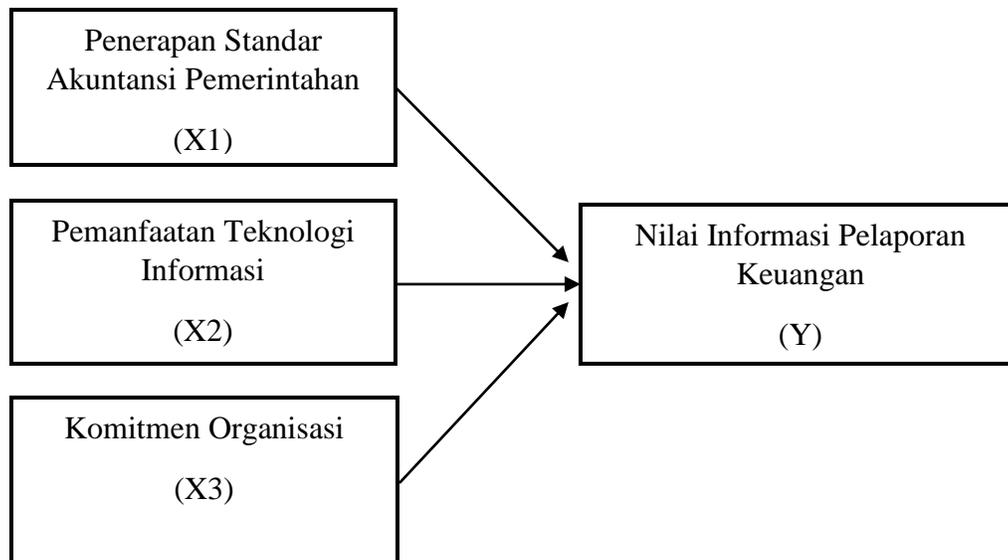
Bedasarkan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap penyusunan laporan keuangan yang reliabel sudah dilaksanakan oleh Rosalin dan Kawedar (2011), mengungkapkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi secara positif pada kehandalan laporan keuangan di Badan Layanan Umum. Dengan begitu, maka meningkatnya komitmen organisasi untuk mempertahankan kepatuhan pada

pelaporan laporan keuangan juga akan meningkatkan kehandalan informasi laporan keuangan sesuai berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Berlandaskan hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

H3 : “Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung”

METODE PENELITIAN

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah menyusun dan melaporkan informasi daerahnya kepada pemerintah pusat, seperti pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Oleh karena itu penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi yang benar serta Komitmen Organisasi yang baik akan menghasilkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan yang bagus dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pusat. Berdasarkan hal tersebut kerangka berpikir yang dapat digambarkan pada penelitian ini berdasarkan variabel independen dan variabel dependennya adalah sebagai berikut:



Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dilatar belakangi kemudahan dan ketersediaan data dalam melakukan penelitian.

Obyek dari penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung.

Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau sering disebut sebagai variabel terikat (Sugiyono, 2011.61). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), dan Komitmen Organisasi (X_3).

Variabel dependen atau sering disebut sebagai variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang berubah sebagai dampak dari variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2011.61). Adapun variabel dependen pada penelitian ini yaitu Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung (Y).

Berdasarkan perkembangan zaman saat ini seharusnya terjadi perubahan sudut pandang untuk pembangunan nasional. Perubahan sudut pandang dapat diimplementasikan melalui kebijakan otonomi daerah yang telah ditetapkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Atas dasar peraturan tersebut pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah berubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ialah kaidah-kaidah akuntansi yang telah ditentukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP yang baik diekpektasikan bahwa LKPD dapat disusun secara berkualitas dan bermanfaat, dengan begitu laporan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam mengambil keputusan. Kejadian yang menyita perhatian beberapa pihak saat ini pada instansi yang bergerak di bidang publik di Indonesia yaitu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk melaporkan seluruh kegiatannya secara akuntabel dan transparan. Pada instansi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dinyatakan sebagai sumber

informasi yang relevan atas kegiatan dan kinerja keuangannya kepada para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berdasarkan Mardiasmo (2002: 87), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang pengembalian tugas dalam melaporkan pertanggungjawaban, menyusun, melaporkan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan instansinya kepada pihak pemberi tugas berhak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Teknologi informasi pada teknologi komputer dapat dalam bentuk perangkat keras ataupun perangkat lunak dalam pengolahan dan penyimpanan data, selain itu dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menyebarkan informasi. Teknologi informasi antara lain komputer, *software*, database, jaringan, *electronic commerce*, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan teknologi (Wilkinson dkk., 2000 dalam Arfianti, 2011). Komputer merupakan salah satu unsur dari teknologi informasi, yaitu alat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu manusia untuk berbagai hal terkait teknologi informasi. Selain itu, komputer dapat menggantikan manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan manusia seperti menyediakan informasi. Proses pengolahan data menjadi informasi yang mudah dipahami dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, dengan begitu penggunaannya akan lebih memahami informasi yang disampaikan (Wahana Komputer, 2003). Fungsi komputer dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menyediakan informasi. Pada saat komputer dan instrumen lainnya dihubungkan dengan teknologi informasi dapat disambungkan pada suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada kegiatan lain yang ditambahkan ataupun dikurangi. Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009) mengungkapkan bahwa dalam memanfaatkan teknologi informasi akuntansi dapat digunakan dalam bidang akuntansi untuk pelaksanaan pekerjaan, komponen lain yang perlu diperhatikan, yaitu meliputi: 1). Bagian finansial mempunyai komputer yang cukup untuk menjalankan tugasnya, 2). Jaringan internet sudah terhubung di masing-masing bagian kerja 3). Jaringan komputer sudah difungsikan untuk sarana komunikasi antar bagian yaitu untuk pengiriman dan penerimaan informasi, 4). Proses pengelolaan keuangan sudah menggunakan komputer dari proses penerimaan dana hingga pelaporan keuangan, 5).

Pengolahan data transaksi keuangan telah memanfaatkan *software* yang didasarkan pada peraturan undang-undang, 6). Laporan keuangan dan manajerial tercipta dari pemanfaatan sistem yang terintegrasi, 7). Penyusunan jadwal untuk memelihara dan memeriksa sarana secara berkala, 8). Pendataan seluruh sarana penunjang yang telah rusak dan selanjutnya dan dilakukan perbaikan pada alat-alat tersebut.

Komitmen organisasi ialah sebuah sikap psikologis yang didasarkan pada keinginan, kebutuhan dan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya pada suatu instansi. Adapun komitmen organisasi meliputi tiga komponen yaitu: komitmen afektif, komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif. Dari ketiganya tersebut, komitmen afektif merupakan jenis komitmen yang paling diharapkan oleh perusahaan. Individu dengan loyalitas tinggi pada umumnya memiliki komitmen afektif, individu tersebut lebih cenderung akan tetap bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Komitmen kepada organisasi sangat dibutuhkan oleh seorang pimpinan organisasi tersebut, hal tersebut ditujukan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten di dalam organisasi (Indriasari, 2008).

Dalam mencapai tujuan dan kemanfaatan dalam menyajikan laporan keuangan, maka informasi yang termuat di dalamnya seharusnya memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Arif dkk (2009), informasi pada laporan keuangan dapat dinyatakan andal jika pihak yang memanfaatkannya dapat mengandalkan informasi tersebut untuk mencitrakan kondisi ekonomi pada suatu instansi. Keandalan ialah kemampuan informasi dalam menyampaikan informasinya secara benar dan valid. Di dalam informasi yang termuat pada laporan keuangan terbebas dari pengertian/pemahaman yang menyesatkan dan kesalahan material, mengungkapkan tiap-tiap fakta secara jujur, serta dapat dikonfirmasi kebenarannya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa informasi bisa saja relevan, namun apabila pada pelaporannya tidak dapat diandalkan maka pemanfaatan informasi tersebut dapat mengakibatkan penyesatan bagi pihak yang menggunakannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data yang diperoleh adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Data primer ini diperoleh melalui metode survey dengan menyebarkan kuesioner pada responden yang dilakukan pada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung.

Populasi adalah kumpulan obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan sifat-sifat tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan selanjutnya ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:115). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Badung, yang terdiri dari 38 OPD dengan rincian 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 21 Dinas, 7 Badan, 1 Rumah Sakit Umum Daerah dan 6 Kecamatan.

Menurut Sugiyono, 2014 sampel merupakan bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Metode pengumpulan sampel pada penelitian ini yakni *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai yang menduduki jabatan sebagai kepala subbagian keuangan, pembukuan, dan bendahara di seluruh OPD Kabupaten Badung
- b. Memiliki masa jabatan lebih dari 1 tahun (agar pegawai memiliki cukup pengalaman apabila pegawai tersebut baru saja dipindahkan ke bagian keuangan)

Jumlah populasi dan jumlah sampel penelitian di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jumlah Sampel
1	Sekretariat Daerah	375	3
2	Sekretariat DPRD	90	3
3	Inspektorat	68	3
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	3
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	110	3

6	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	256	3
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	71	3
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	30	3
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51	3
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85	3
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58	3
12	Dinas Pariwisata	111	3
13	Dinas Kesehatan/Puskesmas	682	3
14	Dinas Kebudayaan	72	3
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3093	3
16	Dinas Perhubungan	170	3
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154	3
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	69	3
19	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	203	3
20	Dinas Sosial	54	3
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	342	3
22	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	80	3
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	61	3
24	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	73	3
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	132	3
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	97	3
27	Dinas Perikanan	61	3
28	Dinas Pertanian dan Pangan	187	3
29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	68	3
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	53	3
31	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	518	3
32	Satuan Polisi Pamong Praja	210	3
33	Kantor Camat Mengwi	136	3
34	Kantor Camat Kuta	105	3
35	Kantor Camat Kuta Utara	96	3
36	Kantor Camat Kuta Selatan	76	3
37	Kantor Camat Abiansemal	76	3
38	Kantor Camat Petang	58	3
Total Populasi / Sampel		8258	114

Sumber: Rekapitulasi PNS Kabupaten Badung tahun 2018

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan terkait dengan penelitian secara tertulis kepada responden penelitian untuk dijawab. Pada penelitian ini, kuesioner diantarkan langsung ke lokasi penelitian

yaitu pada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert.

Adapun skala Likert yang digunakan adalah sebagai berikut:

STS	: Sangat Tidak Setuju	skor 1
TS	: Tidak Setuju	skor 2
KS	: Kurang Setuju	skor 3
S	: Setuju	skor 4
SS	: Sangat Setuju	skor 5

Uji asumsi klasik berfungsi untuk menilai, mengukur serta memastikan apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak. Model regresi dinyatakan layak jika data yang digunakan normal dan bebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui status regresi tersebut maka dilakukan beberapa uji, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menilai data pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Apabila asumsi ini tidak dilakukan, maka uji statistik tersebut akan bias, khususnya pada penelitian yang menggunakan sampel kecil. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansinya $\alpha > 0,05$ mengindikasikan a data berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikansinya $\alpha < 0,05$ mengindikasikan data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas ialah tidak ada korelasi yang kuat antara variabel bebas dalam suatu model regresi, maka model mengalami multikolinearitas. Beberapa ciri terjadinya multikolinearitas pada model yaitu model memiliki koefisien determinasi yang tinggi akan tetapi variabel bebas yang secara signifikan mempengaruhi variabel terikat melalui pengujian t.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya galat, atau adanya beda varian dan resiadual untuk seluruh pengamatan dalam model

regresi. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansinya $>0,05$, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda ialah korelasi secara linier antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini berfungsi untuk mengetahui arah korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah tiap-tiap variabel bebas berkorelasi secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini model persamaan linier yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
X1	= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
X2	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
X3	= Komitmen Organisasi
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi dari masing-masing variabel
ε	= Error

1) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk menilai seberapa jauh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yaitu berada diantara 0-1. Apabila nilai (R^2) mendekati 1 mengindikasikan variabel bebas menjelaskan variabel terikat lebih terukur (Ghozali, 2016).

a) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F berfungsi untuk menilai kelayakan model apakah dapat dianalisis lebih lanjut, dan memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau tidak (Ghozali, 2016). Pedoman dalam mengambil keputusan pada uji F yaitu jika nilai signifikansinya $<0,05$, maka berarti model layak, dan sebaliknya apabila nilai signifikansinya $>0,05$, maka berarti model tidak layak.

b) Uji T

Uji T berfungsi untuk menilai seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara individual (Ghozali, 2016). Pedoman dalam mengambil

keputusannya yaitu: apabila nilai signifikansi t hitung $>0,05$, berarti H_0 ditolak, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikansi t hitung $<0,05$, berarti H_0 diterima, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Badung dengan mengambil tiga sampel di masing-masing OPD (Kepala Sub-bagian Keuangan, Pembukuan dan Bendahara) dengan masa jabatan lebih dari satu tahun, agar pegawai tersebut memiliki cukup pengalaman apabila baru saja dipindahkan ke bagian keuangan. Adapun rincian pengiriman dan penerimaan kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Rincian pengiriman dan penerimaan kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	114
Jumlah kuesioner yang kembali	114
Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya	0
Kuesioner yang dianalisis	114
Kuesioner yang kembali (114/114x100%)	100%
Kuesioner yang dianalisis (114/114x100%)	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 114 eksemplar, yang disebar secara langsung ke masing-masing kantor Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung dan setelah melakukan pengecekan terakhir jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 114 eksemplar dan sudah lengkap terisi semua, hanya beberapa dari kuesioner tidak mencantumkan nama. Jadi jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 114 kuesioner.

Analisis Statistik deskriptif berfungsi untuk mengetahui distribusi data pada sampel. Pada penelitian ini statistik deskriptif dapat mencitrakan distribusi data, dengan menggunakan nilai-nilai seperti: nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAP	114	40.00	55.00	46.3070	4.13517
Teknologi	114	25.00	35.00	31.0702	2.78339
Komitmen	114	31.00	45.00	37.2544	3.10527
Nilai Informasi	114	37.00	50.00	42.2982	3.95535
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Lampiran 5 (lampiran statistik deskriptif)

Pada tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi SAP, Teknologi Informasi, Komitmen dan Nilai Informasi. Nilai minimum ialah nilai terendah pada masing-masing variabel. Nilai maksimum ialah nilai tertinggi pada masing-masing variabel. Nilai rata-rata ialah nilai rata-rata yang diperoleh pada tiap-tiap variabel yang diamati. Standar deviasi ialah sebaran data yang menggambarkan data tersebut, apakah tersebar secara homogen atau heterogen secara fluktuatif. Nilai standar deviasi dikatakan homogen apabila nilai yang diperoleh kecil.

Dalam menilai instrumen penelitian maka perlu dilakukan pengujian instrumen yaitu uji validitas dan reliabilitas. Apabila nilai korelasi pada masing-masing sampel $> 0,30$, maka instrumen dinyatakan valid. Instrumen pada masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, maka instrumen dinyatakan handal. Hasil analisis uji validitas dan reliabilitas ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Reliabilitas
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	Koefisien Alpha
X ₁	X ₁₁ – X ₁₁₁	0.627 - 0.807	0.000	0.908
X ₂	X ₂₁ – X ₂₇	0.706 - 0.849	0.000	0.887
X ₃	X ₃₁ – X ₃₉	0.489 – 0.715	0.000	0.819
Y	X ₁₁ – X ₁₁₁	0.612 – 0.854	0.000	0.908

Sumber: Lampiran 6 (lampiran uji validitas dan reliabilitas)

Berdasarkan tabel 4.3, semuavariabel menghasilkan nilai korelasi $> 0,30$ dan koefisien alpha $> 0,70$, maka masing-masing variabel dapat dinyatakan valid dan handal. Berdasarkan hasil tersebut maka instrumen penelitian ini dinyatakan baik sehingga dapat dianalisis lanjutan.

Uji asumsi klasik berfungsi untuk menilai model regresi apakah sudah sesuai dengan kriteria *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil uji asumsi klasik ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Uji normalitas berfungsi untuk menilai apakah pada model regresi, variabel residualnya berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametric *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan yaitu, apabila nilai signifikansinya $> 0,05$, maka variabel dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji K-S dapat dilihat pada tabel 4.4.1.

Tabel 4.4.1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.77334852
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.063
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.138 ^c

Sumber: Lampiran 7 (lampiran uji asumsi klasik)

Hasil pada tabel 4.4.1 mengindikasikan bahwa nilai signifikansinya adalah $0,138 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa nilai residual pada model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas berfungsi untuk menilai apakah model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui status multikolinearitas pada model regresi, penelitian ini menggunakan nilai toleransi dan *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel 4.4.2.

**Tabel 4.4.2
 Uji Multikolinearitas
 Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	-2.644	2.227		-1.187	.238		
	SAP	.542	.059	.567	9.174	.000	.478	2.091
	Teknologi	.214	.285	.280	3.348	.008	.513	1.949
	Komitmen	.437	.079	.343	5.542	.000	.477	2.095

a. Dependent Variable: Nilai Informasi

Sumber: Lampiran 8 (lampiran uji asumsi klasik)

Hasil pada tabel 4.4.2 menunjukkan bahwa nilai toleransinya adalah $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat dinyatakan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi heterokedasitas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pada penelitian ini menggunakan uji gletjer. Hasil uji heterokedasitas ditunjukkan pada tabel 4.4.3.

Tabel 4.4.3 Uji Gletjer

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.767	1.371		-.559	.577
SAP	.010	.036	.036	.269	.789
Teknologi	.021	.052	.198	1.313	.223
Komitmen	-.056	.049	-.153	-1.148	.253

a. Dependent Variable: Abres
 Lampiran 9 (uji asumsi klasik)

Pada hasil tabel 4.4.3 mengindikasikan bahwa tidak ada variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan. Hasil tersebut dapat dikatakan karena nilai signifikasinya yaitu $> 0,05$. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami heterokedastisitas.

Tabel 4.5 Tabulasi Output SPSS

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	-2.644	-1.187	.238	

SAP	0.567	9.174	.000	Signifikan
Teknologi Informasi (TI)	0.280	3.348	.008	Signifikan
Komitmen	0.343	5.542	.000	Signifikan
Adjusted R Square	0.794			
F Statistik	145.745			
Probabilitas (p-value)	0,000			
Variabel Dependen	Nilai Informasi			

Lampiran 10 (lampiran regresi)

Dari tabel tersebut, dapat dibuatkan fungsi regresi sebagai berikut.

$$\text{Nilai Informasi} = -2.644 + 0.567\text{SAP} + 0.280\text{TI} + 0.343\text{Komitmen} + e$$

Berlandaskan pada persamaan di atas, jika seluruh variabel bebas tidak memiliki nilai, maka besarnya Nilai Informasi adalah -2.644. Untuk nilai beta masing-masing variabel memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 poin variabel bebas maka dapat menambah sesuai dengan nilai standardized Beta.

Nilai adjusted R square yang diperoleh yaitu 0,794 mengindikasikan bahwa 79,4% variasi nilai Nilai Informasi dapat dipengaruhi oleh faktor SAP, Teknologi Informasi, dan Komitmen. Sedangkan sisanya sebesar 20,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Hasil pengujian p-value menghasilkan nilai $0,000 < 0,05$, maka artinya SAP, Teknologi Informasi, dan Komitmen secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada Nilai Informasi. Variabel SAP organisasi memiliki koefisien positif sebesar 0,567 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Variabel Teknologi Informasi memiliki koefisien positif sebesar 0.280 dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ berarti Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. Variabel Komitmen memiliki koefisien positif sebesar 0.343 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti Komitmen berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

PEMBAHASAN

Berlandaskan pada hasil pengujian hipotesis maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa SAP memiliki dampak penguatan

terhadap Nilai Informasi. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka semakin tinggi nilai informasi pelaporan keuangan. Hipotesis ini dinyatakan diterima karena didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menghasilkan penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kusumah (2012) mengungkapkan bahwa penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga pada penelitian Putra dan Amar (2015) dan Ningtyas (2015) mengungkapkan bahwa efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Teknologi Informasi pada Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Berlandaskan pada hasil pengujian hipotesis maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik Teknologi Informasi maka Nilai Informasi pelaporan keuangan juga akan meningkat. Hipotesis ini dinyatakan diterima karena didukung penelitian sebelumnya. Yosefrinaldi (2013) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Sumatera Barat memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indriasari dkk. (2008), Winidyaningrum dkk. (2010), Mustafa dkk. (2010), Rosalin dkk. (2011) dan Hullah dkk. (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi secara positif pada keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi pada Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Berlandaskan pada hasil pengujian hipotesis dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 diterima. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi Komitmen Organisasi maka nilai informasi pelaporan keuangan juga semakin baik. Hipotesis ini diterima karena didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian Noprial (2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012), Widiutami dkk. (2017) dan Virmayanti dkk. (2017) mengungkapkan bahwa karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi pada perusahaan, maka karyawan tersebut sudah memahami bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya ditujukan untuk kepentingan

organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Begitupula pada sebuah instansi pemerintahan, jika komitmen organisasi dalam setiap OPD baik, maka akan mempengaruhi hasil pelaporan keuangan OPD tersebut, jadi jika komitmen organisasi OPD baik akan menghasilkan laporan keuangan OPD yang baik pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis, maka simpulan yang dapat diambil adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, teknologi informasi dan komitmen organisasi memiliki dampak positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi maka akan dapat lebih meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Agar disetiap OPD yang ada di Kabuapten Badung dapat secara lebih efektif menerapkan standar akuntansi pemerintahan sehingga nilai informasi pelaporan keuangan dapat ditingkatkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi serta sarana prasarana agar dilengkapi sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Komitmen organisasi sangat diperlukan demi kekompakan dalam bekerja dan menyelesaikan tugas tugas, sehingga para karyawan dapat bekerja dengan semangat dan penuh tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, Daniel Kartika & Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual).Jurnal STIE Semarang.No. 3 Vol. 5.

- Adi Irawan Setiyanto, Selvi Nurul Hidayati. 2017. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol.5, No.1
- Budiana, H.R.,Sjafirah, N.A. dan Bakti, I. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Bagi Para Guru SMPN 2 Kawali Desa Citeureup Kabupaten Ciamis. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol.4, No.1
- Cok Istri Agung Prami Shintia, Ni Made Adi Erawati. 2017. Pengaruh Kualitas SDM, Sitem Informasi, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21.2
- Firdaus, SE, Dr.Nadirsyah, SE, M.Si, Ak, CA, Dr.rer.pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol.4, No.1
- Fitri Mansur, Eko Prasetyo, Reka Maiyarni. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. Vol.2, No.2.
- I Wayan Karsana, I Gusti Ngurah Agung Suaryana. 2017. Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21.1
- Karmila, Amries Rusli Tanjung dan Edfan Darlis. April. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal SOROT* vol. 9, No. 1
- Lidia Natalia, Isma Coryanata. 2018. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan Pembiayaan Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*. Vol.8, No.3
- Nanda Safrizal, Fauziah Aida Fitri. 2018. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3, No.1
- Nike Yusnita Mahardini, Ade Miranti. 2018. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Jurnal Akuntansi. Vol.5, No.1

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sally Paulina Sandanafu, Mis Fertyno Situmeang. 2018. Pengaruh Kapasitas SDM, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah